

**KONDISI KAWASAN HERITAGE
DI PUSAT KOTA DENPASAR**

***HERITAGE AREA CONDITIONS
IN THE CITY CENTRE OF DENPASAR***

**I Wayan Runa, I Nyoman Warnata, dan
I Nyoman Gede Mahaputra**

Dosen FT. Arsitektur Univ. Warmadewa, Jln. Terompong No. 24 Tanjung
Bungkak Denpasar-Bali, Tlp. (0361) 223858, Fax (0361) 235073. Rumah : Jln.
Soka Gg. Kertapura VB/9 Kesiman Denpasar, Tlp. (0361) 462831,
Hp. 08174775043, Email : sarwaguna@yahoo.co.id

Received September, 05, 2011 / Accepted December, 15, 2011

Material of this study are mostly sought primary data directly at the sites. In addition, also equipped with the relevant secondary data from journals or books results of previous studies. Based on the previous description, the following are some things that can be concluded that the need for conservation of

architecture in the area of Chinatown shops Jl. Gajah Mada. Maintaining an

optimal architecture for the Bali office buildings, commercial, and private properties. Arrangement of villages in Bali and the revitalization of the museum behind the Dutch bell. Making playgrounds, bird cage, and water pumps in the Field Puputan. Redesign statue Puputan Badung and Denpasar additional historical function of diorama. Making small museums along the zone Z. Manufacture of bags / parking spaces around the Square Puputan Badung. Governments need to relocate the building to another location to Puputan Badung Square as a center of cultural heritage.

Key words : Heritage, conservation.

PENDAHULUAN

Pusaka Budaya (*cultural Heritage*) adalah seluruh unsur-unsur budaya, baik benda maupun tak benda yang memiliki ciri-ciri utama: (1) Berumur minimal 50 tahun; (2) Sarat dengan nilai-nilai religius, estetik, historis, seni, dan sains; (3) Mewakili style, gaya hidup, waktu (kronos), daerah (topos), atau mindset (logos) tertentu; (4) Ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang (UU.No.11, 2011, tentang Cagar Budaya). Lembaga dunia UNESCO juga memiliki definisi tersendiri tentang *heritage, nature, and cultural* (konvensi UNESCO, 1972). Mardika dkk (2010) mengungkapkan tentang beragamnya potensi pusaka arkeologis, historis, dan permukiman urban di Kota Denpasar, baik kategori unsur *tangible* maupun *intangible*.

Citra Kota Denpasar (Peter J.M.Nas, 1996) juga diidentifikasi dalam beragam narasi. Kota Simbol (berkat banyaknya perlambang kota); Kota Gunung (terkait dengan orientasi hulu warga kota dengan mengarah pada Gunung Agung dengan dikhotomi Umanis-Etnis); Kota Tradisi (terkait dengan hidupnya beragam tradisi pribumi, seperti ritual Nyepi, Galungan, Tumpek); Kota Pariwisata (terkait besarnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik); Kota Seni (terkait hidupnya beragam cabang seni, dari seni tabuh, tari, rupa sampai seni kreatif); Kota Kumuh, berkat adanya beragam simpul area kumuh di tepi sungai, pasar, dan di tepi jalan raya. Sejalan dengan heterogenitas dan pluralis warga kota, denyut kota juga menghormati keragaman kultur dalam manifestasi toleransi wawasan multikultural (Geriya, 2011).

Kota berwawasan budaya memosisikan kebudayaan dalam tiga fungsi utama sebagai potensi dasar, sebagai pendekatan, dan sebagai orientasi pembangunan yang bersifat holistik dalam keseimbangan dan berkelanjutan. Di pihak lain Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan Bali, mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan kota menjadi sangat pesat. Kendatipun Pemerintah Kota Denpasar telah berusaha mengarahkan dan menata lingkungan melalui penataan *Land Consolidation*,

namun arah perkembangan dan pertumbuhan bangun-bangunan belum terarah dan berkembang sangat sporadis ke seluruh bagian kota.

Dalam Perda Kota Denpasar No. 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-bangunan, telah mencantumkan persyaratan jarak bebas bangunan dengan mengatur KDB, KLB. Selain itu diatur pula mengenai sempadan bangunan yang didasarkan atas lebar badan jalan. Dalam upaya peningkatan tertib pembangunan khususnya Kawasan Heritage Jl. Thamrin, Jl. Gajah Mada, Jl. Veteran, Jl. Udayana, dan Jl. Surapati Denpasar, maka perlu adanya pendataan dan inventarisasi lebar badan jalan, sempadan bangunan, penataan fasade bangunan, serta perencanaan pedestrian dengan segala aspek ikutannya yang ada saat ini.

Dengan telah dilaksanakan kota kreatif berbasis budaya unggulan nampaknya belum menguat, membumi, dan belum terapresiasi secara menyeluruh seperti yang terjadi di kawasan kota pusaka tersebut. Masyarakat justru kelihatan cenderung menghindari pergi ke Zona Z, tetapi mereka lebih banyak memilih pergi ke swalayan. Apabila limit waktu tidak diantisipasi tepat pada waktunya dengan tindakan-tindakan terfokus, maka diperkirakan kota pusaka akan mulai tenggelam atau ditinggalkan masyarakat.

BAHAN DAN METODE

Bahan atau materi penelitian ini sebagian besar berupa data primer yang dicari langsung di lokasi penelitian. Selain itu, juga dilengkapi dengan data sekunder yang relevan dari jurnal terbaru atau buku-buku hasil penelitian sebelumnya. Bahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah peta, gambar, foto dan kehidupan sosial budaya masyarakat secara empirik.

Mengumpulkan data sekunder diantaranya melalui Foto Citra Satelit IKONOS Kota Denpasar, digitasi Foto Citra Satelit IKONOS Kota Denpasar dan Peta Jaringan Jalan yang ditata melalui penataan *land consolidation* di Kota Denpasar. Sebelum dilaksanakan pemetaan lapangan terlebih dahulu dilakukan observasi sesuai dengan penugasan di Kawasan Heritage Jl. Thamrin, Jl. Gajah Mada, Jl. Veteran, Jl. Udayana, dan Jl. Surapati Denpasar. Memberikan arahan

kepada semua kelompok team survey lapangan. Pemetaan ruas-ruas jalan di atas foto satelit IKONOS lengkap dengan koordinat lapangan dengan alat bantu GPS untuk akurasi posisinya di lapangan. Pengukuran langsung di lapangan untuk memenuhi data-data dasar terukur yang diperlukan seperti: panjang jalan, lebar badan jalan, sempadan bangun-bangunan material perkerasan, trotoar, vegetasi/pohon, *street furniture*, *planter box*, dan utilitas. Dokumentasi wajah bangunan sepanjang jalan sesuai penugasan yaitu Penataan Kawasan Heritage Jl. Thamrin, Jl. Gajah Mada, Jl. Veteran, Jl. Udayana, dan Jl. Surapati Denpasar. Hasil pemetaan dari survey dan pengukuran lapangan dituangkan ke dalam peta dasar dengan skala peta 1 : 2.000.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Filosofi dan Konsep. Empat pilar filosofi lokal yang mengandung spirit universal merupakan potensi pokok keberadaan pusaka budaya di daerah Bali, termasuk pusaka budaya di Kota Denpasar. Keempat filosofi tersebut adalah : kosmos, theos, antropos dan logos. Pusaka Budaya (cultural Heritage) adalah seluruh unsur-unsur budaya, baik benda maupun tak benda yang memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut : (1) Berumur minimal 50 tahun; (2) Sarat dengan nilai-nilai religius, estetika, historis, seni dan sains; (3) Mewakili style, gaya hidup, waktu (kronos) atau daerah (topos) atau mindset (logos) tertentu; (4) ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang (UU.No.3/1990, tentang Benda Cagar Budaya). Lembaga dunia UNESCO juga memiliki definisi tersendiri tentang *heritage, nature and cultural* (konvensi UNESCO, 1972).

Penelitian tentang Penelusuran Sejarah Kota Denpasar oleh Nengah Keddy Setiada, dkk (2009) mengungkapkan, bahwa rentang dinamika sejarah kota Denpasar mencakup Era Kerajaan, Era Modern (Kolonial dan Republik) sampai Era Posmo. Terjadi dinamika dan transformasi menurut proses *Continuity in Change*, tatkala beragam unsur tradisi tetap *survive* di era modern, bahkan posmo. Tradisi itu mencakup filosofi, kearifan lokal, lembaga tradisional, konsep-konsep desa, tata nilai sampai dengan berbagai unsur budaya benda dan tak benda. Akar

tradisi budaya, yaitu kebudayaan Bali merupakan basis jatidiri kota Denpasar modern dan metropolitan.

Aneka Bentuk dan Fungsi Pusaka. Penelitian Pusaka Budaya Arkeologis, Historis dan Pemukiman Urban (Mardika,dkk, 2010) mengklasifikasikan dua bentuk pusaka budaya, yaitu Tangible dan Intangible. Penelitian tersebut juga menginventori unsur-unsur Pusaka Budaya Khas Denpasar yaitu Prasasti Belanjong, Prasala di Pura Dalem Cemara, Pura Susunan Wadon, Pura Dalem Sakenan, Cagar Budaya Puri Kesiman, Makna Puputan Badung, Upacara Ngerebong, Kesiman, Rumah Panjang di Sakenan, dan Tari Baris Cina. Ada banyak nilai yang tercakup dalam pusaka budaya. Nilai sentral umumnya dibedakan atas dua kategori : (1) nilai ekspresif yang terdiri atas nilai spiritual, seni dan solidarita; (2) nilai progresif yang meliputi nilai sains, ekonomi dan kekuasaan. Enam jenis nilai sentral tersebut berpotensi membangun kolaborasi harmoni,tetapi juga berpeluang membentuk relasi paradoks.

Ditengah potensi harmoni dan peluang paradoks, juga muncul kemungkinan terwujudnya kolaborasi campur-campur tentang keunggulan, kenormalan dan keburukan. Di tengah ekspektasi tentang terwujudnya kota budaya, kita tak boleh mengabaikan berkembangnya budaya kota sebagai satu gaya hidup atau hibitus warga urban dalam upaya beradaptasi dengan lingkungan urban. Kota Budaya_adalah satu ekspektasi atau satu imaginasi tentang kehidupan kota yang benar-benar berlandaskan dan tertata dalam konfigurasi nilai-nilai budaya luhur : harmoni, seimbang, sejahtera, tertib, kaya etika, estetika, sains, spiritual, beradab, bersatu, damai, nyaman, human. Budaya kota_adalah refleksi empiri gaya hidup urban, satu konfigurasi budaya yang terlahir dari kecenderungan perilaku, habitus, gaya hidup yang tidak bernilai luhur dan humanis. Semisal : budaya kebut-kebutan, budaya corat-coret, budaya kumuh, budaya waktu tanpa batas, budaya serba cepat, dan budaya ruko.

Pentingnya Heritage Dalam Wacana Pembangunan Kota. Pemerintah Indonesia sebenarnya sangat peduli dengan bidang pelestarian. Hal itu terbukti secara normatif dalam redaksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya (Amandemen ke-4) ada yang berhubungan dengan

pelestarian. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32, Ayat 1). Kemudian negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang (Pasal 18 B, Ayat 2).

Kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional diharapkan berfungsi sebagai potensi dasar yang melandasi segala gerak dan langkah pembangunan daerah Bali. Kebudayaan daerah yang dimaksud adalah kebudayaan daerah Bali yang dilandasi oleh agama Hindu. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam penyusunan RTRWP Dati I Bali telah dikaji berbagai falsafah dan konsepsi tata ruang yang tumbuh dan berkembang di daerah Bali sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang senantiasa dilandasi oleh ajaran agama Hindu. Hal ini dilakukan agar kebudayaan benar-benar menjadi landasan dasar dalam penyusunan tata ruang, sehingga kebudayaan/budaya daerah mampu membangun identitas atau jatidiri tata ruang dengan segala isinya. Jatidiri tata ruang merupakan suatu totalitas yang memiliki ciri khas. Dalam kehidupan nyata, jatidiri tata ruang harus mampu merefleksikan suatu tingkat kualitas, peradaban, dan menjadi kebanggaan yang dapat memberikan kesejahteraan material dan spiritual bagi manusia.

Dengan bertitik tolak pada unsur pelestarian (Amiluhur Soeroso, 2011), pemanfaatan dan pengembangan, maka kota ini perlu melakukan pengembangan kebudayaan yang menjadi dasar dari pembangunan ekonomi. Kebudayaan perlu diletakkan



Gambar: Salah satu heritage di pusat kota Denpasar adalah Patung Catur Muka.

menjadi jantung kebijakan pembangunan sehingga merupakan investasi penting perkembangan masyarakat di masa depan dan sebuah awal kesuksesan prinsip keanekaragaman budaya lokal. Pembangunan disini tentunya tidak sinonim dengan pertumbuhan ekonomi semata. Fokusnya adalah pemuasan eksistensi intelektual, emosional, moral, dan spiritual.

Tantangan utamanya adalah meyakinkan pembuat keputusan politik dan aktor sosial baik lokal, nasional dan internasional untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keanekaragaman dan nilai-nilai pluralisme kebudayaan ke dalam seluruh kebijakan publik, mekanisme dan praktik khususnya melalui kemitraan antara sektor publik dan privat. Strategi ini bertujuan, di satu sisi, memasukkan kebudayaan menjadi kebijakan pembangunan yang berhubungan dengan pendidikan, pengetahuan, komunikasi, kesehatan, lingkungan dan pariwisata. Sementara di sisi lain, dukungan pembangunan sektor kebudayaan terutama ekonomi melalui industri kreatif yang memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan sehingga menawarkan manfaat penting dalam konteks kohesi sosial.

Dalam konteks ekonomi barang atau sering disebut juga sebagai modal atau sumberdaya kebudayaan merupakan sebuah produk. Aset atau sumberdaya tersebut dianggap sebagai modal karena dapat memberikan kontribusi, dan bahkan dapat pula berkombinasi dengan berbagai *input* dari produksi barang dan layanan jasa lainnya. Karena merupakan sebuah modal, maka logikanya fitur kebudayaan tersebut tentunya memiliki nilai, atau afdol disebut sebagai “nilai kebudayaan”, yang dapat didekati dari banyak aspek seperti antropologi, sosiologi, ekonomi dan lain-lain (Klamer dalam EUR, 2003). Mengacu Pearce (1993), Throsby (1995, 1999), Moran dan Bann (2000); maka nilai ekonomi total (TEV) merupakan penjumlahan seluruh nilai berikut: $TEV = \text{Nilai Ekstrinsik} + \text{Nilai Intrinsik} \dots$ (1). Jika diuraikan lebih lanjut maka bentuk persamaan (1) dapat ditranslasikan menjadi persamaan (2). $TEV = (\text{Nilai Ekstrinsik Langsung} + \text{Nilai Ekstrinsik Tidak Langsung}) + (\text{Nilai Eksistensi} + \text{Nilai Pilihan} + \text{Nilai Warisan})\dots$ (2)

Nilai ekstrinsik langsung adalah nilai eksistensi karena dapat langsung dikonsumsi, sedangkan nilai ekstrinsik tidak langsung berupa nilai pilihan dan nilai warisan karena konsumennya adalah generasi mendatang. Throsby (1999)

mengatakan bahwa barang kebudayaan adalah modal penghasil nilai kebudayaan karena memasukkan unsur nilai yang dimiliki masyarakat seperti sosial, sejarah, dan dimensi kebudayaan lainnya. Dengan begitu, di dalam barang kebudayaan terkandung nilai estetika (keindahan, harmoni), spiritual (pengetahuan, pencerahan, wawasan), sosial (hubungan dengan sesama, perasaan memiliki identitas), sejarah (hubungan dengan masa lalu), simbolis (pembawa atau penyimpan pesan) dan keaslian (integritas, keunikan).

Selain nilai kebudayaan (yang bersifat ekstrinsik), barang kebudayaan juga memiliki nilai ekonomi (yang bersifat intrinsik) yaitu nilai eksistensi (karena keberadaannya), pilihan (untuk dilestarikan atau tidak) dan warisan (bagi generasi di masa depan). Oleh sebab itu, dari persamaan (1) dan (2) nilai total manfaat ekonomi barang kebudayaan dapat pula dinyatakan sebagai berikut. $TEV = \text{Nilai Kebudayaan} + \text{Nilai Ekonomi} \dots (3)$. Kemudian persamaan (3) dapat dirinci ke dalam persamaan (1.4) sebagai berikut. $TEV = (\text{Nilai estetika \& harmoni} + \text{Nilai Spiritual} + \text{Nilai Sosial} + \text{Nilai Sejarah} + \text{Nilai Simbolis} + \text{Nilai Keaslian}) + (\text{Nilai Eksistensi} + \text{Nilai Pilihan} + \text{Nilai Warisan}) \dots (4)$

Proses Pembentukan Kota Denpasar. Denpasar pada mulanya merupakan pusat Kerajaan Badung, akhirnya pula tetap menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan bahkan mulai tahun 1958 Denpasar dijadikan pula pusat pemerintahan bagi Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Dengan Denpasar dijadikan pusat pemerintahan bagi Tingkat II Badung maupun Tingkat I Bali mengalami pertumbuhan yang sangat cepat baik dalam artian fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Keadaan fisik Kota Denpasar dan sekitarnya telah sedemikian maju serta pula kehidupan masyarakatnya telah banyak menunjukkan ciri-ciri dan sifat perkotaan. Denpasar menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri dan pusat pariwisata yang terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan dan Denpasar Utara.

Seperti halnya dengan kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Denpasar merupakan Ibukota Propinsi mengalami pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta lajunya pembangunan di segala bidang terus meningkat,

memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kota itu sendiri. Demikian pula dengan Kota Denpasar yang merupakan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan sekaligus juga merupakan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Bali mengalami pertumbuhan demikian pesatnya. Pertumbuhan penduduknya rata-rata 4,05% per tahun dan dibarengi pula lajunya pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor, sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Kota Denpasar, yang akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan yang harus diselesaikan dan diatasi oleh Pemerintah Kota Administratif, baik dalam memenuhi kebutuhan maupun tuntutan masyarakat perkotaan yang demikian terus meningkat. Berdasarkan kondisi obyektif dan berbagai pertimbangan antara Tingkat I dan Tingkat II Badung telah dicapai kesepakatan untuk meningkatkan status Kota Administratif Denpasar menjadi Kota Denpasar. Dan akhirnya pada tanggal 15 Januari 1992, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar lahir dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Pebruari 1992 sehingga merupakan babak baru bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan juga bagi Kota Denpasar.

Kondisi Geografi. Kota Denpasar terletak diantara $08^{\circ} 35' 31''$ - $08^{\circ} 44' 49''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 10' 23''$ - $115^{\circ} 16' 27''$ Bujur timur, yang berbatasan dengan: di sebelah Utara Kabupaten Badung, di sebelah Timur Kabupaten Gianyar, di sebelah Selatan Selat Badung dan di sebelah Barat Kabupaten Badung. Karena letaknya relatif berada di tengah-tengah Pulau Bali tersebut maka *tag line* Kota Denpasar adalah *The Heart of Bali*. Ditinjau dari Topografi keadaan medan Kota Denpasar secara umum miring kearah selatan dengan ketinggian berkisar antara 0-75m diatas permukaan laut. Morfologi landai dengan kemiringan lahan sebagian besar berkisar antara 0-5% namun dibagian tepi kemiringannya bisa mencapai 15%.

Tabel: Luas Lahan di Kota Denpasar
Dirinci per Kecamatan (hektar)

No.	Kecamatan	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
1	Denpasar Barat	299	10	309
2	Denpasar Timur	586	23	609
3	Denpasar Selatan	754	2018	2772
4	Denpasar Utara	955	4038	4993

Sumber: Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Denpasar.

Kota Denpasar mulai Tahun 2006 dimekarkan, sehingga secara administratif menjadi 4 wilayah Kecamatan dan terdiri atas 43 Desa/Kelurahan (16 Kelurahan, 27 Desa). Kecamatan Denpasar Selatan terdiri atas 6 Kelurahan dan 4 Desa, Kecamatan Denpasar Timur terdiri atas 4 Kelurahan dan 7 Desa, Kecamatan Denpasar Barat terdiri atas 3 Kelurahan dan 8 Desa. Kecamatan Denpasar Utara terdiri atas 3 Kelurahan dan 8 Desa, 399 Banjar Dinas dan 386 Banjar Adat, dengan jumlah penduduk Kota Denpasar Tahun 2006 sebanyak 574.955 jiwa, Denpasar Barat 168.580 jiwa, Denpasar Selatan 167.358 jiwa, Denpasar Timur 110.272, dan Denpasar Utara 137.390 jiwa.

Kota Denpasar termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi angin musim sehingga memiliki musim kemarau dengan angin timur (Juni-Desember) dan musim hujan dengan angin barat (September-Maret) dan diselingi oleh musim Pancaroba. Suhu rata-rata berkisar antara 25,4°C - 28,5°C dengan suhu maksimum jatuh pada bulan Januari, sedangkan suhu minimum pada bulan Agustus. Jumlah Curah Hujan tahun 2008 di Kota Denpasar berkisar 0-406 mm dan rata-rata 97,1 mm. Bulan basah (Curah Hujan >100 mm/bl) selama 4 bulan dari bulan Nopember s/d Pebruari Sedangkan bulan kering (Curah Hujan <100 mm/bl) selama 8 bulan jatuh pada bulan Maret sampai Oktober. Curah Hujan tertinggi terjadi pada pada bulan Pebruari (406 mm) dan terendah terjadi pada bulan Oktober (0 mm).

Kondisi Bangunan dan Kawasan Bersejarah di Kota Denpasar. Secara makro, di kawasan pusat kota Denpasar pada masa lalu merupakan pusat kerajaan dan pusat ekonomi. Indikasi ini dapat dilihat dari letak Puri Denpasar dan Pasar Badung yang memiliki konsep yang direncanakan mengikuti pola penataan perempatan agung yang sering disebut konsep Catus Patha. Fungsi-fungsi yang

berkembang di kawasan tersebut saat sekarang meliputi : perdagangan dan jasa, perkantoran, permukiman, peribadatan, dan rekreasi.

Pada Kawasan mikro meliputi kawasan Jl. Thamrin, Jl. Gajah Mada-Lapangan Puputan, Jl. Veteran, Jl. Udayana, dan Jl. Surapati Denpasar pada kondisi kekinian terdapat beberapa infrastruktur yang menonjol meliputi : Lapangan Puputan Badung, Kantor / Rumah Jabatan Gubernur, Gedung Kodam IX Udayana, Kantor Walikota Denpasar, Museum Bali, Pura Jagatnatha, Kantor Kodim Wirasatya, Kantor Pelayanan Garuda, Bank BII, Bank Mandiri, Hotel Inna Bali. Selain itu, tentu saja ada infrastruktur perdagangan dan jasa, perkantoran, permukiman, kesehatan, peribadatan, sosial kemasyarakatan, hotel/penginapan, rekreasi, dan pendidikan.

Di pusat Kota Denpasar, masih banyak terdapat pusaka budaya yang mengandung nilai historis dan filosofis keagamaan. Denpasar sebagai Kota Kolonial dapat diamati melalui munculnya gereja, pembangunan dan perbaikan jalan, saluran irigasi, bangunan kantor, tangsi atau penjara, juga tempat rekreasi seperti Museum Bali (1910) serta Kantor Gubernur Jendral Wilayah Bali-Nusra (Gedung Kodam IX Udayana). Juga fasilitas akomodasi seperti Hotel Inna Bali yang merupakan hotel pertama di Bali. Denpasar sebagai Kota Budaya dapat dilihat melalui terbangunnya Puri Satria, Puri Pemecutan, Jero Kuta, dan Puri-Puri pendukung lainnya. Terbangunnya Pura Jagatnatha, dan terbangunnya Pasar Payuk beserta aset budaya atau benda seni yang diperjualbelikan.

Perkembangan Kawasan Puputan dapat dilihat melalui intervensi kolonial menata pusat kota menjadi pola grid (pola kotak/papan catur). Menata "titik nol" - pusat Catus Patha- beberapa kali sehingga menjadi seperti sekarang. Kemudian mengganti pusat kerajaan menjadi alun-alun, dan memasukkan arsitektur kolonial pada bangunan pemerintah dan bangunan hotel. Sesungguhnya secara kawasan sampai sekarang belum ada batas yang tegas antara Kawasan Heritage Pusat Kota Lama R1 dengan Kawasan Heritage Pusat Kota Lama R2 dan Kawasan Heritage Pusat Kota Lama R3. Hal ini tentu akan memberikan kesulitan tersendiri dalam pengaplikasian konsep-konsep penataan kawasan heritage selanjutnya.

Kondisi fisik bangunan dan kawasan bersejarah di Kota Denpasar juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan fisik pedestrian, tata hijau, tata parkir, dan prasarana utilitas. Kondisi fisik di Jl. Thamrin dapat dikemukakan bahwa Bale Kulkul terpinggirkan oleh bangunan dan infrastruktur (tiang dan kabel listrik serta telepon), pedestrian ways sebelah kiri/barat jalan cukup lebar, sedangkan pedestrian ways sebelah kanan/timur jalan relatif lebih sempit. Penataan Central Parkir cukup membantu mengurangi *on street parking*, tata hijau (perdu dan rumput) di persimpangan Thamrin - Gajah Mada belum optimal. Keberadaan iklan di depan pertokoan juga sangat mendominasi ruang di Jl. Thamrin. Sebagian besar trotoar, tempat pembuangan sampah, utilitas, wajah arsitektur ruko, parkir mobil pariwisata ukuran besar, dan tata hijau belum direncanakan secara baik.

Di Jl. Gajah Mada bangunan Bank Legian kurang menunjukkan jatidiri arsitektur tradisional Bali. Kemudian fasilitas parkir pengunjung di Pasar Badung masih terasa kurang. Pertokoan di sebelah utara Jalan Gajah Mada relatif lebih ramai karena didukung oleh fasilitas parkir sepeda motor, sedangkan pertokoan di Jalan Gajah Mada sebelah selatan lebih sepi bahkan beberapa ruko ada yang tutup/bangkrut karena salah satunya tidak boleh ada parkir kendaraan. Beberapa bangunan ruko (rumah toko) berlantai 5 ada yang kurang terawat. Berdasarkan hasil survey dikatakan pernah ada “pemaksaan” kepada pengunjung karena mereka parkir kendaraan di depan toko tertentu tetapi ketika berbelanja di lain toko. Beberapa pohon jepun ada yang kurang bagus pertumbuhannya, dan tanaman merambat di depan toko kurang terpelihara. Ketinggian level permukaan trotoar dan teras depan toko lantai satu tidak sama sehingga ruang terasa sempit untuk lalu lalang pengunjung. Perkerasan dengan material batu sikat di sekitar Patung Catur Muka banyak mengelupas.

Kondisi fisik di Jl. Veteran dapat dikemukakan bahwa pedestrian ways sebelah kanan dan kiri jalan relatif lebih sempit. Sebagian besar trotoar, tempat pembuangan sampah, utilitas, wajah arsitektur ruko, dan tata hijau belum direncanakan secara baik. Tetapi dari segi jumlah pohon peneduh relatif sudah cukup. Perkerasan di sekitar Patung Cokorda Mantuk Ring Rana di perempatan Banjar Taensiat belum ditata dengan baik. Keberadaan iklan di depan pertokoan

juga sangat mendominasi ruang di Jl. Veteran. Kondisi fisik di Jl. Udayana dapat dikatakan relatif baik terutama pedestrian ways sebelah kanan dan kiri jalan relatif lebih lebar dengan perkerasan dan tata hijau lebih rapi. Hanya di beberapa tempat saja yakni di ujung bagian selatan kurang tertata dan dimensinya lebih sempit.

Kondisi fisik di Jl. Surapati bagian barat dapat dikatakan sudah bagus. Sedangkan bagian tengah dan timur dapat dikemukakan bahwa pedestrian ways sebelah kanan dan kiri jalan relatif lebih sempit. Sebagian besar trotoar, tempat pembuangan sampah, utilitas, dan tata hijau belum direncanakan secara baik. Kebetulan pada saat survey sedang ada pekerjaan saluran atau perbaikan got sehingga terkesan tidak teratur, berdebu, dan banyak tumpukan material pada beberapa tempat. Beberapa bangunan ruko tidak memiliki lahan parkir yang cukup. Pada awalnya kawasan ini merupakan pusat pemerintahan khususnya pemerintahan Kota Denpasar tetapi peruntukan yang paling menonjol di kawasan perencanaan ini adalah kawasan perdagangan dan kawasan wisata (*City Tour*).

Potensi Kepariwisata Kota Denpasar. Pariwisata merupakan sektor yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat secara langsung dan merupakan sektor andalan dalam pembangunan di daerah yang di dukung oleh sektor – sektor lain. Potensi pariwisata yang begitu menonjol di Kota Denpasar perlu dikelola secara profesional dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan, sosial, dan budaya baik fisik maupun non fisik.

Selain mengunjungi objek wisata, yang tidak kalah menarik minat bagi wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah destinasi wisata adalah berupa atraksi wisata atau aktivitas masyarakat yang bersifat khusus. Semakin spesifik atau semakin langka suatu atraksi, maka daya tariknya akan semakin tinggi. Namun demikian, tidak semua atraksi dapat dikomersialkan atau dijual kepada wisatawan terutama kegiatan - kegiatan yang disakralkan. Adapun atraksi yang dapat ditonton dan disajikan untuk di Kota Denpasar terdiri atas atraksi seni budaya, dan berbagai festival seperti Sanur Village Festival, Festival Pulau Serangan, Mahabandhana Prasadha, dan Denpasar Festival.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya maka berikut ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu perlunya pelestarian arsitektur pecinan di kawasan pertokoan Jl. Gajah Mada. Mempertahankan arsitektur Bali secara optimal bagi bangunan perkantoran, perdagangan, dan milik perorangan. Penataan kampung di belakang museum Bali dan revitalisasi Lonceng Belanda. Pembuatan taman bermain, sangkar burung, dan pompa air di Lapangan Puputan. Redisain patung Puputan Badung dan penambahan fungsi sejarah Denpasar berupa diorama. Pembuatan museum-museum kecil sepanjang Zona Z. Pembuatan kantong/ruang parkir di sekitar Lapangan Puputan Badung. Perlu relokasi gedung pemerintah ke lokasi lain agar Lapangan Puputan Badung sebagai pusat pusaka budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiluhur Soeroso, 2011, Peranan Ekonomi Kebudayaan Dalam Pembangunan Pariwisata Perkotaan.
- Ardhana I Ketut, 2004, Denpasar: Perkembangan Dari Kota Kolonial Hingga Kota Wisata, *The 1st international Conference on Urban History Indonesia* di Universitas Airlangga, Surabaya pada tanggal 23-25 Agustus 2004.
- GCI (Getty Conservation Institute). 1998. *Economics and Heritage Conservation: A Meeting Organized by the Getty Conservation Institute*. Los Angeles: Getty Center.
- Geriya, I Wayan, 2002, Konsep Dasar, Dimensi Filosofi dan Strategi Konservasi Warisan Budaya Bali. Makalah dalam TOT dan DOT Konservasi Warisan Budaya Bali. Denpasar.
- Keddy Setiade, Nengah, dkk, 2009, Penelusuran Sejarah Kota Denpasar. Bappeda Kota Denpasar.
- Mardika, Nyoman, I Made Mardika, A.A.Rai Sita Laksmi, 2010, Pusaka Budaya. Representasi Ragam Pusaka dan Tantangan Konservasi di Kota Denpasar Bali (I Wayan Geriya, ed). Denpasar. Bappeda Kota Denpasar.
- Moran D., and C. Bann. 2000. *the Valuation of Biological Diversity for National Biodiversity Action Plans and Strategies: a Guide for Trainers*. United Nations Environmental Program (UNEP).

- Nas, Peter J.M., 1996, Perlambangan di Denpasar tentang Pariwisata dan Tradisi dalam Jurnal Ilmu – Ilmu Sosial. Jakarta. Universitas Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pearce, D.W. 1993. *Economic Value and the Natural World*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Throsby, D., 1999. Cultural capital. *Journal of Cultural Economics*, 23: 3-12.
- Triguna, I B. Yudha, 1998, Teori Simbol. Denpasar. Universitas Hindu Indonesia Press.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada tokoh masyarakat sepanjang Zona Z terutama kepada Bendesa Adat dan pemilik toko yang dengan tulus telah memberikan banyak informasi untuk penyusunan tulisan ini. Selain itu, juga kepada seluruh masyarakat kota Denpasar atas segala bantuan informasi dan suguhan selama penulis melakukan penelitian lapangan. Tentu penghargaan tak terhingga disampaikan kepada Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur yang telah membantu selama pengumpulan data lapangan.